

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil*(CPO) adalah salah satu minyak nabati yang sebagian besar diproduksi di Indonesia, yaitu sekitar 48,27% dari total produksi CPO dunia dan 55,5% dari total luas kebun kelapa sawit dunia, hingga saat ini sekitar 77% produksi CPO diekspor secara global.<sup>1</sup> Statistik ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia ke sejumlah negara. Pada tahun 2022, Indonesia telah mengekspor minyak sawit sebesar total US\$17,36 miliar, jumlah tersebut mewakili 53,46 persen dari seluruh nilai ekspor minyak sawit dunia yang diperkirakan mencapai US\$32,48 miliar pada tahun 2022.<sup>2</sup> Sebagai salah satu negara dengan kebutuhan konsumsi minyak nabati paling besar, Uni Eropa (UE) merupakan importer minyak sawit terbesar bagi Indonesia.

Ada beberapa jenis minyak nabati yang paling sering digunakan oleh UE, diantaranya yaitu minyak biji bunga matahari, minyak kanola, minyak kedelai, dan minyak sawit. Antara rentang waktu tahun 2009 hingga 2016, penggunaan CPO di UE meningkat pesat sebesar 190.000 ton per tahun, atau 3,23 persen per tahun.<sup>3</sup> Melalui data yang sudah dipaparkan ini, sudah jelas bahwa Indonesia

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022 (Jakarta :Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021), 2

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional, 2020-2022, 3

<sup>3</sup> "Supply-Demand Minyak Nabati Uni Eropa : Apakah Resolusi Sawit Mudah

memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan UE akan minyak nabati. Namun, selama fase perkembangan ini kelapa sawit Indonesia menghadapi banyak tantangan meskipun potensinya sangat besar. Diskriminasi yang dilakukan UE terhadap kelapa sawit Indonesia yang direalisasikan melalui resolusi kelapa sawit dalam *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests Renewable Energy Directive II (RED II)* merupakan kendala terbesar yang dihadapi Pemerintah Indonesia saat ini.

RED II merupakan kebijakan yang memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota UE mengenai penggunaan energi terbarukan. Pengaturan pembatasan penggunaan minyak sawit sebagai sumber energi terbarukan menjadi salah satu topik diskusi.<sup>4</sup> Kampanye hitam yang dilakukan oleh UE ini dimulai ketika Komisi Eropa merilis rancangan kebijakan yang berjudul *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* pada 13 Maret 2019.<sup>5</sup> Penggunaan lahan tidak langsung atau *Indirect Land Use Change (ILUC)* adalah kriteria yang akan digunakan oleh Komisi Eropa dalam *Delegated Regulation* dan salah satu minyak nabati yang termasuk kedalam bahan berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan adalah minyak sawit.<sup>6</sup>

Pada 9 Desember 2019, Indonesia merespons hal tersebut dengan mengirimkan permohonan ke WTO dan menggugat UE. Pada proses gugatan

---

Diimplementasikan?," gapki.id, diakses pada Maret, 2024, <https://gapki.id/news/2017/05/31/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan/>

<sup>4</sup> "Renewable Energy Directive (RED II)", Committees European Parliament, diakses pada 25 Maret 2024, <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/renewable-energy-directive-red-ii/product-details/20220214CDT09123>

<sup>5</sup>European Commission, Commission Delegated Regulation (EU) of 13.3.2019 (Brussels : European Commission, 2019), 4

<sup>6</sup>European Commission, Commission Delegated Regulation (EU), 5

pertama ini, permohonan Indonesia ditolak dalam pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) tahun 2020. Indonesia menyarankan dalam permohonan ini agar UE mengubah strategi RED II dan peraturan yang didelegasikan. Meski demikian, pada Senin 27 November 2023, Indonesia tetap mengajukan permohonan kedua meminta pembentukan panel untuk kedua kalinya. Walaupun tetap ada penolakan dari pihak UE, aplikasi ini secara otomatis akan membuat panel di WTO.<sup>7</sup> Berdasarkan temuan tinjauan panel WTO, kebijakan RED II UE yang hanya membatasi penggunaan minyak sawit dalam pembuatan biofuel bertentangan dengan komitmen UE di WTO karena mengkategorikan minyak sawit sebagai bahan mentah yang berisiko tinggi terhadap ILUC, panel menyimpulkan bahwa kebijakan RED II mendiskriminasi produk minyak sawit Indonesia.<sup>8</sup>

Dari keseluruhan produksi minyak sawit yang diperdagangkan di pasar global saat ini, Penerapan RED II akan menyebabkan kelebihan produksi hingga 10,05% atau 4,55 juta ton per tahun menurut data impor UE selama lima tahun sebelumnya.<sup>9</sup> Pasokan produksi minyak sawit yang berlebihan ini berimbas pada harga minyak sawit yang jatuh dalam dua tahun terakhir, termasuk kinerja PDB negara, persepsi produk CPO di pasar global, neraca perdagangan, dan permasalahan lapangan kerja juga merupakan dampak lanjutan yang dialami Indonesia akibat kebijakan RED II. Dalam siaran pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan mengatasi permasalahan ini dengan

---

<sup>7</sup> "Skenario Putusan WTO RED II Dan Respon Pemerintah Indonesia," INDEF, diakses pada 30 Mei 2024, <https://indef.or.id/publikasi/skenario-putusan-wto-red-ii-dan-respon-pemerintah-indonesia/>

<sup>8</sup> Andrew D. Mitchell, Dean Merriman, "Indonesia's WTO Challenge to The European Union's Renewable Energy Directive : Palm Oil and Indirect Land Use Change," Vol. 12, no. 548 (2020) : 566-568

<sup>9</sup> Hendra Maujana Saragih, Hanna Rahayu, "Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022), 301-303

sejumlah inisiatif baru, termasuk melibatkan sektor swasta. Kementerian Luar Negeri akan memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit pada tahun 2024 dan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan lain.<sup>10</sup>

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang beranggotakan para pengusaha kelapa sawit Indonesia berupaya memperbaiki persepsi terhadap kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu contoh aktor non-negara yang terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam berdiplomasi. Indonesia segera mengeluarkan kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk mematuhi program RED II UE dan SDGs guna mewujudkan lahan kelapa sawit Indonesia sesuai dengan prinsip keberlanjutan, sebagai respons terhadap kebijakan RED II UE yang akan mengancam ekspor CPO. Sertifikasi ini didasarkan pada legalitas usaha, pengelolaan perkebunan, perlindungan pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanggung jawab pekerja, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. GAPKI yang bertugas mengelola lahan kelapa sawit Indonesia turut berkontribusi dalam implementasinya.<sup>11</sup>

Alternatif lain untuk menjaga keberlangsungan Industri ekspor CPO dan kestabilan ekonomi dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengalihkan ekspor minyak sawitnya ke pasar lain yang lebih berpotensi seperti Cina, India, Pakistan,

---

<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pidato Menlu Pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 2024 (Jakarta: Kemlu.go.id, 2024) diakses pada 30 Mei 2024 <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5658/pidato/pidato-menlu-pada-pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2024>

<sup>11</sup>Fatima Benyaich, Hendra Maujana Saragih, Joel Jeremis Siburian, "The Impact of the European Union's Palm Oil Resolution Policy on the Indonesian Economy Sector," *Ilomata International Journal of Social Science*, Volume 4, Issue 3 (July 2023) : 502

dan Amerika Serikat dengan menerapkan standar pengelolaan ramah lingkungan melalui kebijakan ISPO yang akan memperbaiki citra industri minyak sawit Indonesia.<sup>12</sup> Dengan adanya penerapan RED II, UE sebagai salah satu tujuan pasar utama ekspor minyak sawit Indonesia menurun tajam dan pengalihan ekspor CPO ke Cina dan India yang memiliki kebutuhan CPO lebih tinggi dari UE merupakan alternatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi penurunan ini.

Cina yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan potensi kebutuhan minyak nabati yang diperkirakan akan terus bertambah melebihi UE menjadikan Cina sebagai keputusan alternatif tujuan ekspor minyak sawit yang dipilih Indonesia setelah embargo minyak sawit UE.<sup>13</sup> Demikian pula dengan India yang merupakan salah satu importir minyak sawit terbesar di dunia, sangat bergantung pada pasokan minyak sawit Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi. Sebagian penduduk India membutuhkan minyak sawit untuk diolah menjadi minyak goreng dan produk memasak, sebagian lainnya membutuhkan minyak sawit untuk aplikasi non-makanan seperti deterjen, biofuel, dan kosmetik.<sup>14</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup> Tirsya Neyatri Bandrang, Ditho Ramadhan, "Dampak Diterapkannya Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II) Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia," *Jurnal Penelitian Agri Hatantiring*, Vol 03, No. 01 (2023) : 12

<sup>13</sup> "Menelusuri Perjalanan Minyak Sawit dari Indonesia ke Tiongkok," *wri-indonesia.org*, diakses pada 05 Juni 2024, <https://wri-indonesia.org/id/insights/tracing-palm-oil-journey-indonesia-china>

<sup>14</sup> Yosua Saut Marulitua Gultom, "Perdagangan Minyak Sawit Indonesia ke India: Analisis Ecologically Unequal Exchange," *Vol.8 No.2 (Juli-Desember 2023)* : 289

Kebutuhan terhadap minyak sawit semakin hari semakin meningkat di UE, akan tetapi lahan yang tersedia sangat terbatas sehingga memicu UE untuk memunculkan isu kampanye negatif dengan mengeluarkan kebijakan RED II dan mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia, memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar pada Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam strategi dengan mengeluarkan kebijakan standar pengelolaan minyak kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) agar ekspor CPO diterima kembali di pasar UE walaupun pelarangan total ini masih ditunda hingga tahun 2030. Hal ini demi membantu menjaga keberlanjutan ekspor kelapa sawit Indonesia dan memulihkan citra industri minyak kelapa sawit dalam negeri agar walaupun setelah produk CPO ditolak sepenuhnya pada tahun 2030 oleh UE, Indonesia tetap bisa memasuki pasaran negara selain UE yang memiliki kebutuhan tinggi akan CPO seperti India, Pakistan, dan Cina, sehingga penting untuk dibahas bagaimana Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor produk kelapa sawit pasca RED II UE.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara umum, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengembangkan penelitian lainnya, terutama dalam konteks upaya diplomasi Indonesia ke UE

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan luar negeri Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan alternatif bagi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi.

## **1.6. Studi Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan tiga kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka yang digunakan berupa artikel jurnal dan bentuk tulisan lainnya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Kajian pustaka ini menjadi landasan dan sumber informasi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.

Referensi pertama yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Djoesept Harmat Tarigan yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* Yang Dikeluarkan Uni Eropa”.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh UE. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*literature research*), baik terstruktur maupun semi terstruktur. Berdasarkan temuan studi tersebut, pada tanggal 9 Desember 2019, Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk mewakili negara di Jenewa, Swiss, dengan membawa tanggung jawab melaporkan kasus terhadap UE ke WTO. Selain itu, Indonesia menerapkan langkah-langkah kebijakan dalam upaya untuk memberi perlawanan terhadap peraturan RED II UE dengan secara resmi memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel yang sangat dibutuhkan oleh UE.

Pembeda artikel jurnal yang ditulis oleh Djoesept Harmat Tarigan dengan penelitian "Diplomasi Multi-jalur Indonesia Terhadap Keberlanjutan Ekspor Produk Kelapa Sawit Pasca RED II Uni Eropa" terletak pada aktor yang berperan. Aktor yang berperan dalam artikel jurnal ini hanya Indonesia sebagai aktor negara dalam melakukan diplomasi dengan mengirim *Request for Consultation* pada 9 Desember 2019 sebagai tahap inisiasi awal dalam mengajukan gugatan mengajukan di WTO. Langkah selanjutnya yang dilakukan Indonesia yaitu mengeluarkan balasan kebijakan tegas dengan mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau *nikel ore*. Sedangkan dalam penelitian "Diplomasi Multi-jalur Indonesia

---

<sup>15</sup> Djoesept Harmat Tarigan, "Upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan Uni Eropa," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No. 6 (2022)

Terhadap Keberlanjutan Ekspor Kelapa Sawit Pasca RED II Uni Eropa” peneliti menganalisis secara menyeluruh menggunakan konsep diplomasi multi-jalur yang dijelaskan oleh Louise Diamond dan John McDonald yaitu diplomasi dengan cara *peacebuilding* antar negara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan melalui perpaduan dari diplomasi jalur Pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu. Peran organisasi kelapa sawit yang ada di Indonesia seperti GAPKI sebagai aktor non-negara memberikan kontribusi dalam membantu kinerja Pemerintah juga mengarahkan opini publik baik domestik maupun internasional dalam menyuarakan kampanye positif kelapa sawit.

Selanjutnya referensi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Putu Ratih Kumala Dewi yang berjudul "*The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016*".<sup>16</sup> Artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam membebaskan 10 awak kapal Indonesia dari kelompok Abu Sayaf menggunakan konsep diplomasi multi-jalur dan *peacemaking*. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dipilih dalam pembebasan pendekatan *track one* (Pemerintah) dan *track two* (aktor profesional) menunjukkan bahwa upaya pembebasan ini juga melibatkan jaringan informal seperti lembaga non Pemerintah yang profesional yaitu Desi Fitriani jurnalis Metro TV, LSM pemberdayaan masyarakat dan anti kekerasan di Mindanao, Filipina Selatan, dan tim yang dibentuk oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berperan besar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, dan pemerintah

---

<sup>16</sup> Putu Ratih Kumala Dewi, "The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016," *Andalas Journal of International Studies* Vol 8, no. 2, (2019)

tetap menjadi pemimpin dalam diplomasi ini, yang kesemuanya dilakukan dengan satu tujuan perdamaian yaitu memulangkan sandera dengan selamat.

Artikel jurnal yang berjudul “*The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016*” ini digunakan sebagai sumber informasi bahwa negara bukan aktor tunggal dalam melakukan diplomasi. Aktor non-negara lain seperti seperti NGO, MNC, dan komunitas masyarakat juga menjalankan fungsi-fungsi kediplomatan sesuai dengan kapasitas dan profesi para aktor. MNC bergerak dari ranah operasionalisasi perusahaan, NGO merepresentasikan kalangan masyarakat, sementara komunitas dan individu dapat mengimplementasikan praktik diplomasi melalui ranah digital. Melalui analisis diplomasi multi-jalur maka akan dianalisis kontribusi tindakan dan strategi yang dilakukan para aktor non-negara tersebut dalam melakukan diplomasi untuk meningkatkan indikator kesuksesan negara dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Referensi lainnya yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Feri Jaya Warsa Sembiring dan Stivani Ismawira Sinambela yang berjudul “Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II*”.<sup>17</sup> Tulisan ini menjabarkan bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan diplomasi komersial agar produk kelapa sawit Indonesia tetap bisa beredar di pasar Eropa. Diplomasi komersial sering digunakan citra negara yang bernegosiasi, dukungan ekspor, pemasaran, riset, dan

---

<sup>17</sup> Feri Jaya Warsa Sembiring, Stivani Ismawira, "Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II*," *Journal of Global Perspective* Vol 2, No. 1 (2024)

publikasi dengan melibatkan aktor non-negara yang dilakukan oleh masyarakat suatu bangsa, kelompok bisnis, media, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Indonesia melakukan diplomasi komersial serta mencari pasar baru ke berbagai negara di dunia untuk keberlangsungan industri CPO Indonesia. Dengan melakukan aktivitas promosi komoditas perdagangan CPO yang berkesinambungan di pasar dunia untuk memberikan pemahaman serta kesadaran publik dan membangun citra positif bahwasannya minyak kelapa sawit tidaklah sama seperti yang dituduhkan dalam RED II yang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit berdampak negatif.

Perbedaan artikel jurnal “Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II” dengan “Diplomasi Multi-jalur Indonesia Terhadap Keberlanjutan Ekspor Produk Kelapa Sawit Pasca RED II Uni Eropa” terletak pada konsep yang digunakan. Artikel jurnal ini menggunakan konsep diplomasi komersial yang memfokuskan analisis peran aktor non-negara dalam diplomasi publik untuk mempromosikan dan memperbaiki citra produk kelapa sawit ke negara lain setelah UE mengeluarkan kebijakan RED II. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian “Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II” yang menggunakan konsep diplomasi multi-jalur. Konsep ini berfungsi dalam menganalisis aktor dan fungsinya dalam diplomasi, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu kategori dari 9 aktor yang berperan dalam diplomasi multi-jalur.

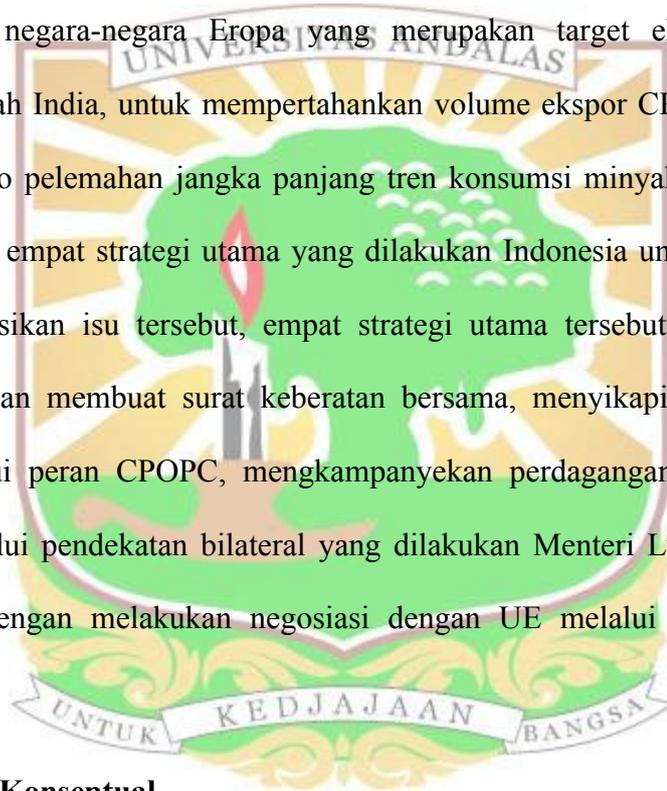
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis juga menggunakan tulisan Sindy Yulia Putri dan Yuliani Widianingsih yang berjudul “Diplomasi Ekonomi Melalui Petisi Online di Industri Kelapa Sawit Indonesia”.<sup>18</sup> Dalam artikel jurnal ini menjabarkan tentang bagaimana diplomasi ekonomi organisasi kelapa sawit menggunakan petisi online sebagai alat advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah agar lebih memperhatikan investasi untuk pemeliharaan dan peremajaan sawit petani. Hasilnya adalah pengaruh petisi online mungkin tidak besar, namun tetap memperoleh perhatian Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah semakin memperkuat kemitraan dengan pengusaha, pihak bank, organisasi sawit, hingga individu terkecil yaitu petani untuk mengembangkan kualitas sawit dan memperpendek rantai birokrasi untuk meningkatkan taraf hidup petani kecil.

Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk melihat strategi menggunakan petisi online change.org memberikan pengaruh signifikan dalam upaya menuntut kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia, dengan cara mempengaruhi opini publik yang menandatangani petisi menuntut Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui program percepatan penerapan kebijakan ISPO yang menjadi pintu bagi keberlangsungan petani kelapa sawit untuk meningkatkan peluang investasi dan memudahkan peminjaman modal dari bank sehingga akan mendukung peran industri kelapa sawit agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

---

<sup>18</sup> Sindy Yulia Putri, Yuliani Widianingsih, "Diplomasi ekonomi melalui petisi online di industry kelapa sawit Indonesia,"Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, vol 8, no. 3 (2020)

Tulisan yang berjudul “*Indonesian Government Strategies on Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest*” yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan Komang Audina Permana Putri menjadi referensi lainnya dalam penelitian.<sup>19</sup> Tulisan ini menjabarkan tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk mempertahankan akses terhadap pasar minyak sawit negara-negara Eropa yang merupakan target ekspor terbesar Indonesia setelah India, untuk mempertahankan volume ekspor CPO ke UE, dan mencegah risiko pelemahan jangka panjang tren konsumsi minyak sawit global. Dijabarkan ada empat strategi utama yang dilakukan Indonesia untuk merespons dan menegosiasikan isu tersebut, empat strategi utama tersebut adalah upaya Indonesia dengan membuat surat keberatan bersama, menyikapi permasalahan tersebut melalui peran CPOPC, mengkampanyekan perdagangan produk CPO yang adil melalui pendekatan bilateral yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI, dan terakhir dengan melakukan negosiasi dengan UE melalui Indonesia EU CEPA.<sup>20</sup>



### **1.7. Kerangka Konseptual**

Upaya yang bertujuan representasional atau mewakili negara asalnya dalam perundingan atau tindakan lain untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri merupakan pengertian diplomasi secara umum. Membela kepentingan sosial dan politik serta terlibat dalam negosiasi internasional mengenai

---

<sup>19</sup> Bustanul Arifin, Komang Audina, "Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest" *Andalas Journal of International Studies*, Vol 8, No. 2 (2019)

<sup>20</sup>Bustanul Arifin, Komang Audina, 218

permasalahan yang dihadapi negara asalnya adalah aspek yang dijunjung tinggi oleh para perwakilan negara yang berdiplomasi.<sup>21</sup> Bidang diplomasi hubungan internasional berkembang cepat di masa modern sebagai cara untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan kepentingan global serta pola hubungan internasional. Permasalahan internasional yang semakin rumit memberikan kesulitan baru untuk berdiplomasi dalam menyelesaikan perselisihan. Strategi diplomasi yang melibatkan banyak aktor atau disebut juga Diplomasi Multijalur adalah upaya yang dapat dilakukan suatu negara dengan tidak hanya melibatkan agen Pemerintah tetapi juga profesional, sektor komersial, dan masyarakat sipil.

### 1.7.1. Diplomasi Multijalur

Dalam bukunya *The Institute for Multitrack Diplomacy* tahun 2012, Louise Diamond dan John McDonald menjelaskan bahwa Diplomasi Multijalur adalah sebuah konsep yang menjelaskan proses bagaimana perdamaian dunia terjadi dalam sistem internasional melalui kombinasi diplomasi Pemerintah, diplomasi kelompok, dan diplomasi individu.<sup>22</sup> Pendekatan sistem digunakan dalam Diplomasi Multijalur untuk menganalisis sifat internasional dan pembangunan perdamaian secara struktural. Untuk membantu terwujudnya atau implementasi perdamaian, operasi pembangunan perdamaian menetapkan kerangka tingkat menengah, yaitu struktur system perilaku dan tindakan

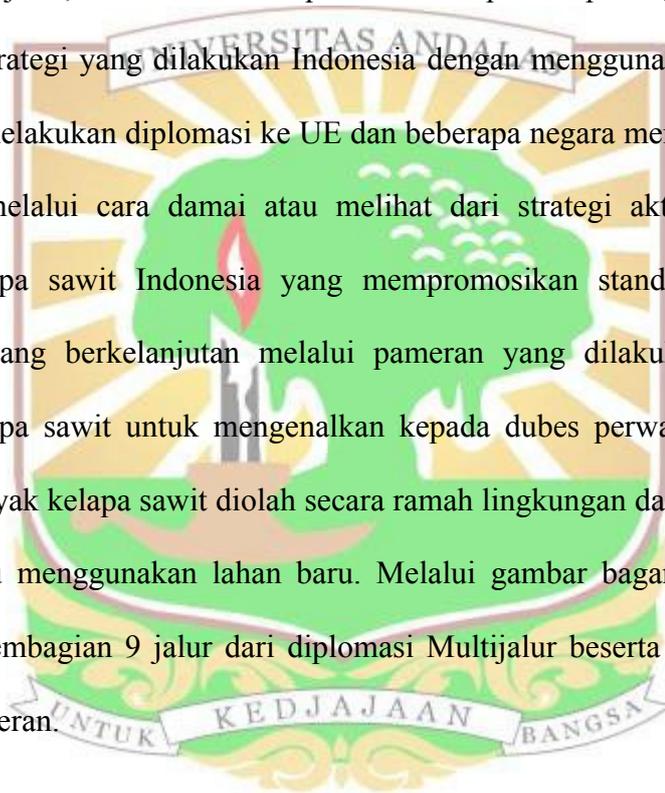
---

<sup>21</sup> Norman, Howard c parkins, *second edition. International relations* (London: The London Institute of world Affairs, 1957), 28

<sup>22</sup> Louise Diamond, John McDonald, *Multi-track diplomacy : a systems approach to peace* (USA: Kumarian Press, 1996). 12

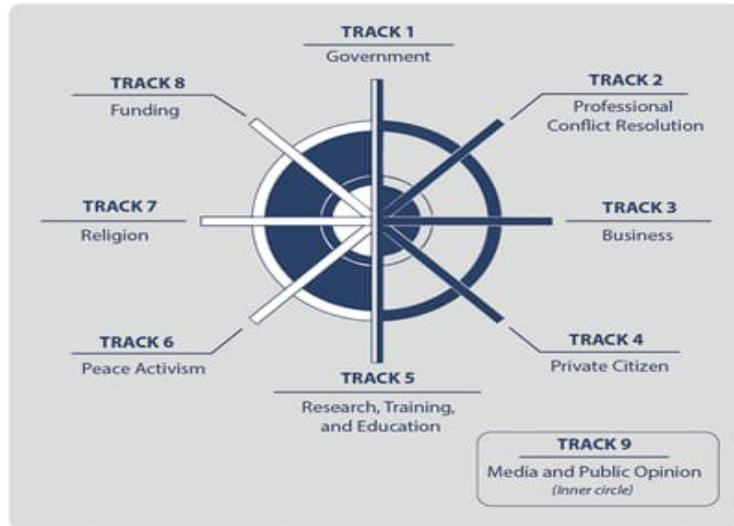
kelembagaan. Membangun militer, ekonomi, dan komunitas yang kuat dan praktis dalam sistem perdamaian adalah tujuannya.<sup>23</sup>

Maka dari penjelasan diatas diplomasi merupakan salah satu instrument penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan negara terhadap suatu isu tertentu dengan melakukan berbagai macam strategi. Mengapa menggunakan diplomasi Multijalur, karena menurut penulis konsep ini tepat digunakan untuk menganalisis strategi yang dilakukan Indonesia dengan menggunakan aktor non-negara dalam melakukan diplomasi ke UE dan beberapa negara memperbaiki citra kelapa sawit melalui cara damai atau melihat dari strategi aktor non-negara organisasi kelapa sawit Indonesia yang mempromosikan standar pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pameran yang dilakukan oleh para pengusaha kelapa sawit untuk mengenalkan kepada dubes perwakilan dari UE bagaimana minyak kelapa sawit diolah secara ramah lingkungan dan tidak melalui deforestasi atau menggunakan lahan baru. Melalui gambar bagan dibawah ini, dapat dilihat pembagian 9 jalur dari diplomasi Multijalur beserta fungsinya dan aktor yang berperan.



---

<sup>23</sup> McDonald, John W. "The Institute for Multi Track Diplomacy." *Journal of Conflictology* Vol.3, Issue 2.(2012): 13.



**Gambar 1.1 9 track actor dalam Diplomasi Multijalur** <sup>24</sup>

Konsep Diplomasi Multijalur terdiri dari Sembilan jalur diplomasi yang merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi yaitu :

1. *Track One: Government*, yaitu upaya diplomasi yang dilakukan berdasarkan interaksi resmi Pemerintah.
2. *Track Two: Nongovernment/Professional*, dimana melalui jalur ini, aktor non Pemerintahan yang professional mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik untuk menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengakomodasi konflik internasional melalui komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah bersama. Aktor di sini tentu mempunyai potensi besar untuk menciptakan perdamaian dengan caranya sendiri tanpa adanya intervensi dari Pemerintah

<sup>24</sup> McDonald, John W. "The Institute for Multi Track Diplomacy." *Journal of Conflictology* Vol.3.Issue 2. (2012): 67

3. *Track Three: Business*, dimana dalam menciptakan perdamaian, jalur ini menggunakan perdagangan yang juga dapat membawa keuntungan. Bisnis menjadi lahan potensial untuk mencapai pembangunan perdamaian melalui aspek ekonomi. Tidak hanya yaitu, hubungan persahabatan dan pengertian internasional melalui komunikasi informal juga dapat mendukung berbagai kegiatan dalam mewujudkan perdamaian. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam perjanjian perdagangan bebas. Melalui perjanjian tersebut dapat tercipta simbiosis mutualisme antara kedua negara sehingga potensi konflik di kedua negara dapat dihindari melalui kerjasama.

4. *Track Four: Private Citizen*, jalur keempat adalah warga negara. Dalam jalur ini pencapaian perdamaian dilakukan oleh swasta atau personal warga negara yang berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan dan perdamaian. Jalur ini biasanya dilakukan dengan diplomasi yang dilakukan oleh warga negara melalui program pertukaran, organisasi relawan swasta, LSM dan berbagai kelompok kepentingan. Biasanya kegiatan pada jalur ini, tidak terlihat oleh publik dan hanya melalui pemahaman maka pencapaian perdamaian dapat dilakukan. Misalnya saja program pertukaran pelajar ditawarkan oleh lembaga tertentu dengan misi menyelesaikan proyeksosial yang bermanfaat tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi negara tujuan.

5. *Track Five: Research, Training, and Education*, pada jalur ini menekankan pada proses pembelajaran sebagai wujud terciptanya perdamaian. Kajian tersebut mencakup penelitian yang berkaitan dengan lembaga pendidikan baik sekolah maupun universitas, yaitu penelitian, analisis dan studi, serta pusat penelitian kelompok minat khusus. Selain itu, kegiatan yang dilakukan melalui seminar dan

loka karya digunakan untuk menggali suatu permasalahan. Persoalan yang ada di dunia pendidikan juga tentang bagaimana mendapatkan keadilan tanpa perlu adanya kekerasan. Misalnya, program beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga tertentu sebagai pelatihan untuk meningkatkan pemikiran kritis tergantung pada manfaatnya.

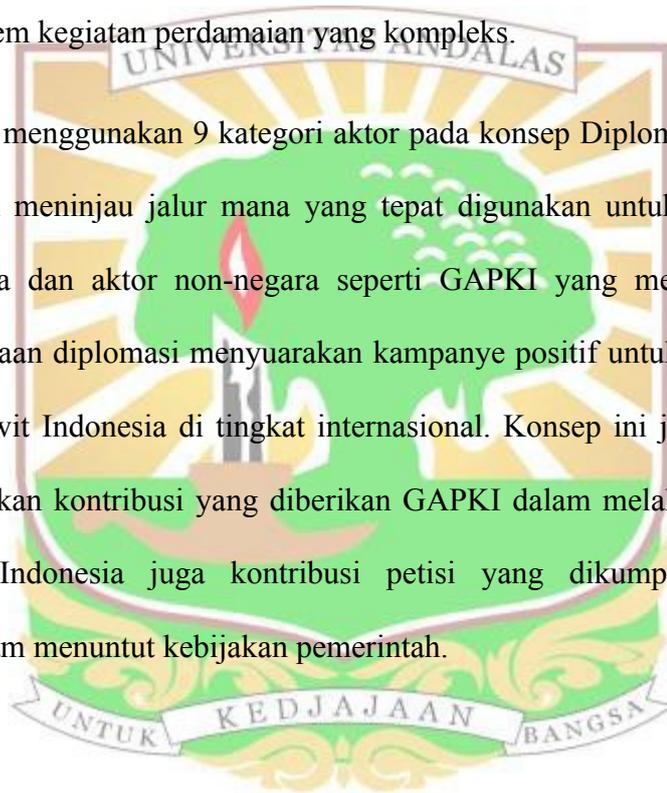
6. *Track Six: Activism*, jalur ini menekankan aktivisme dalam hal hak asasi manusia, lingkungan hidup, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil Pemerintah. Aktivisme tersebut diwujudkan dalam bentuk protes, edukasi, advokasi, aturan, dukungan, dan pengawasan

7. *Track Seven: Religion*, pada jalur ini kegiatan yang dilakukan berorientasi pada perdamaian oleh komunitas spiritual dan keagamaan serta anti kekerasan. Biasanya gerakan-gerakan tersebut mengacu pada pasifisme, yaitu keyakinan bahwa penyelesaian konflik dengan cara damai adalah yang paling benar dan tempat perlindungan adalah tempat yang dianggap sakral dan mampu melindungi seseorang. Contohnya adalah kegiatan sosial berupa kampanye atau diskusi yang dilakukan oleh komunitas keagamaan.

8. *Track Eight: Funding*, jalur ini terkait dengan terwujudnya perdamaian melalui pendanaan oleh komunitas tertentu yang mampu memberikan dukungan finansial terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan melalui jalur lain. Contohnya adalah *Ford Foundation* yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian yang berkonsentrasi pada isu keamanan dan kebijakan publik.

9. *Track Nine: Communications and Media*, pada jalur ini implementasi perdamaian dilakukan melalui informasi yang memanfaatkan media-media yang ada baik melalui media cetak, elektronik dan lain-lain. Penyebaran informasi yang dilakukan melalui media tertentu dapat menjadi sarana edukasi misalnya melalui film dokumenter sejarah atau kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan cepat melalui media cetak atau internet sehingga mudah untuk dapat memahami sistem kegiatan perdamaian yang kompleks.

Dengan menggunakan 9 kategori aktor pada konsep Diplomasi multi-jalur peneliti dengan meninjau jalur mana yang tepat digunakan untuk menganalisis peran Indonesia dan aktor non-negara seperti GAPKI yang memiliki potensi dalam pelaksanaan diplomasi menyuarakan kampanye positif untuk memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia di tingkat internasional. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan kontribusi yang diberikan GAPKI dalam melakukan promosi kelapa sawit Indonesia juga kontribusi petisi yang dikumpulkan melalui [change.org](http://change.org) dalam menuntut kebijakan pemerintah.



## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “upaya Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor sawit pasca RED II” ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar dan data yang diambil dari data sekunder yang kemudian dilakukan dengan teori, pemikiran atau konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif. Dengan demikian peneliti melakukan pengembangan asumsi dan pengumpulan informasi berupa data terkait dengan topik penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk memberikan penjelasan terkait fakta yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan menganalisis bagaimana upaya Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II dengan menjabarkan data dan informasi yang telah didapatkan.

### **1.8.2. Batasan Penelitian**

Batasan waktu dalam penelitian “Diplomasi Multijalur Indonesia ke Uni Eropa untuk keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II” yaitu tahun 2016 hingga 2023. Tahun 2016 Indonesia juga sudah melakukan diplomasi dengan membuat surat keberatan bersama negara-negara yang menyediakan informasi tentang keadaan industri kelapa sawit saat ini dan alasan negara-negara produsen minyak sawit menolak Resolusi UE yang melarang konsumsi minyak sawit untuk

produksi *biofuel* di Eropa seperti Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, Malaysia, Colombia and Guatemala. Tahun 2023 menjadi batas penelitian karena pada tahun tersebut Indonesia dengan organisasi kelapa sawit Indonesia masih melakukan upaya-upaya diplomasi kelapa sawit.

### 1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan diteliti dalam suatu penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, unit analisis dalam penelitian ini yaitu Indonesia sebagai aktor negara dan organisasi kelapa sawit yang terdiri dari pengusaha kelapa sawit sebagai aktor non-negara. Sedangkan Unit eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor yang diteliti dalam penelitian ini. Perilaku para aktor tersebut dapat dilihat dari tindakan yang mereka lakukan, Diplomasi Multijalur Indonesia ke UE untuk keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RED II yang dijadikan sebagai Unit eksplanasi dalam penelitian ini.

Tingkat analisis dari penelitian ini yaitu berada pada tingkat negara, Charles W Kegley Jr dan Eugene R Wittkopf (1995) menyebutkan tingkat analisis negara itu sebagai tingkat nasional atau *national level*. Pada level ini unsur-unsur seperti besarnya negara, lokasi, kekuatan, bentuk dan hambatan yang dihadapinya merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan.<sup>25</sup>

### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu *library research* atau studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari

---

<sup>25</sup> Charles W Kegley Jr, Eugene R Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation* (New York: St. Martin's Press, 1995)

data sekunder yang berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, skripsi, dan publikasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan dokumen resmi seperti bulletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sumber informasi yang diperoleh kemudian diseleksi sehingga menghasilkan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber informasi yang relevan ini kemudian diuraikan secara tekstual dan rinci untuk memahami ide-ide dan makna yang terkandung didalamnya.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Lexy J. Moloeng. Menurut Lexy J. Moloeng, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena, perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan dari subjek yang diteliti. Terdapat tiga tahapan dalam metode deskriptif kualitatif menurut Lexy J. Moloeng, antaranya adalah memproses satuan, melakukan kategorisasi, dan penafsiran data.<sup>26</sup> Dalam memproses satuan, penulis mengumpulkan data dan fakta dari data sekunder yang kemudian akan dijabarkan sehingga memberikan gambaran terkait masalah. Setelah data terkumpul, penulis akan menguraikan fakta dan data yang ada.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2012), 6

## 1.9. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan kerangka penulisan penelitian agar tidak keluar dari pembahasan.

### **BAB II : DINAMIKA PERDAGANGAN INDONESIA DAN UNI EROPA**

Bab ini membahas dinamika perdagangan antara Indonesia dan UE yang mana menjelaskan beberapa rangkaian dinamika perdangan dimulai dari sejarah ekspor Indonesia ke UE. Pada bagian ini penulis menjelaskan :minyak nabati di Indonesia yaitu *Crude Palm Oil (CPO)* sebagai aset ekonomi bangsa, perkembangan hubungan dagang antara Indonesia dan UE dalam sektor kelapa sawit. Selanjutnya dalam Bab II ini juga turut di jelaskan beberapa alasan mengapa UE mengeluarkan kebijakan RED II yang mendiskriminasi dan melarang ekspor produk CPO.

### **BAB III : ALASAN UE MENERIMA KEMBALI IMPOR CPO SETELAH KEBIJAKAN RED II DIKELUARKAN**

Bab ini menjelaskan alasan UE tetap mengizinkan produk CPO dari Indonesia masuk ke pasarannya walau dengan serangkaian aturan ketat terkait pengolahan CPO yang ramah lingkungan dengan serangkaian strategi Pemerintah Indonesia diantaranya yaitu : mengeluarkan kebijakan balasan pelarangan ekspor nikel ke UE yang mengakibatkan kerugian dari pihak UE yang sangat bergantung pada biji nikel dari Indonesia, dan mengeluarkan kebijakan standarisasi

pengelolaan CPO yang ramah lingkungan atau disebut *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan harus dipatuhi oleh semua industri CPO yang ada di Indonesia untuk memperbaiki citra positif CPO.

#### **BAB IV : LANGKAH DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KEBERLANJUTAN EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT**

Bab ini berisikan analisis terkait dengan upaya diplomasi dan strategi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor produk kelapa sawit dengan meninjau peran aktor non-negara organisasi kelapa sawit menggunakan kerangka konseptual diplomasi multi-jalur, kemudian dalam bab ini akan memuat jawaban dari pertanyaan penelitian yang penulis ajukan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian, bab terakhir ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini, penulis juga menyampaikan saran bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang topik ini untuk mengembangkan penelitian mengenai diplomasi Pemerintahan Indonesia dalam berdiplomasi CPO kepada UE di periode selanjutnya atau menggunakan konseptual lainnya.

